

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon

Bunga Milena Noer Anisa¹, Iqbal Noor², Gatot Wahyu Nugroho³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

*milena bunga794@gmail.com*¹, *iqnoor@ummi.ac.id*², *gatotwahyunu2@gmail.com*³

ABSTRACT

Village Fund management is a government program that aims to improve the development and empowerment of village communities. This study aims to evaluate the effectiveness of Village Fund management in community empowerment in Jampangkulon Sub-district, especially in Tanjung Village. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and document analysis. The data collected was analyzed using the theory proposed by Miles and Huberman which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The results showed that the management of the Village Fund in Tanjung Village was quite effective with the effectiveness level reaching 82%. This success can be seen from the increased capacity of the village apparatus, the active participation of the community in program planning and implementation, and the improvement of the quality of life of the village community through various empowerment programs. However, there are several obstacles such as inaccurate population data and low community participation in monitoring the use of Village Funds. To overcome these obstacles, it is necessary to increase socialization, update population data, and improve the skills of village officials. This study concludes that Village Fund management in Tanjung Village is effective in supporting community empowerment, although there is still room for improvement in terms of transparency and community participation. The sustainability of the empowerment program in this village requires an appropriate strategy to optimize available resources and ensure the active participation of all elements of the community.

Keywords : *Village Fund Management, Community Empowerment, Effectiveness.*

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Jampangkulon, khususnya di Desa Tanjung. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung cukup efektif dengan tingkat efektivitas mencapai 82%. Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan kapasitas aparatur desa, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai program pemberdayaan. Namun, terdapat beberapa kendala seperti ketidakakuratan data penduduk dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi, pemutakhiran data penduduk, dan peningkatan keterampilan aparatur desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Keberlanjutan program pemberdayaan di desa ini memerlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan memastikan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Kata kunci : *Pengelolaan Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Efektivitas.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dapat disederhanakan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis oleh sekelompok orang dalam mengatur dan menjalankan suatu organisasi atau kegiatan. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya dan pembagian tugas, pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta pengawasan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Pengelolaan juga meliputi proses perumusan kebijakan dan penetapan tujuan dari sebuah program desa atau kegiatan yang dikelola. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan berupaya merumuskan dan menetapkan arah, sasaran, serta pedoman yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan atau operasional program desa tersebut. Pengelolaan juga mencakup aspek pengawasan, di mana pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Fisabilillah et al., 2020)

Dana Desa adalah program pemerintah yang menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dimana desa tersebut berada. Tujuan utama program ini adalah untuk membangun ekonomi dan mengurangi kemiskinan di desa-desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Dengan adanya dana ini, diharapkan pelayanan publik di desa menjadi lebih baik, pengelolaan keuangan dana desa menjadi lebih transparan dan akuntabel, Teknologi informasi dan komunikasi di desa meningkat, terutama untuk pengelolaan data keuangan desa yang lebih baik, perekonomian desa meningkat, tingkat kemiskinan dapat diturunkan, kesenjangan pembangunan antara desa dapat dikurangi, serta masyarakat desa menjadi lebih berdaya sebagai subjek pembangunan. (Christianingrum, 2022)

Dana desa didistribusikan secara merata dan adil ke setiap desa di setiap kabupaten. Pembagiannya terdiri dari Alokasi Dasar (AD) yang dihitung dengan membagi alokasi dasar per kabupaten dengan jumlah desa. Kemudian ada Alokasi Afirmasi yang diberikan kepada desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi. Selanjutnya, Alokasi Formula disusun berdasarkan data dari kementerian terkait, lembaga statistik, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis. (Indika et al., 2022)

Menurut UU No. 6 tahun 2014 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk

(30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.(PP Nomor 60, 2014)

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada desa, termasuk memberikan Anggaran Dana Desa yang jumlahnya cukup besar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai proyek dari luar, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari program “membangun rumah sendiri”. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan. Pertumbuhan ekonomi diikuti oleh pembangunan desa, yang mencakup pergeseran struktur ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian hingga industri dan jasa, serta pergeseran kelembagaan melalui regulasi dan reformasi kelembagaan. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus melibatkan masyarakat desa dalam semua aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam proses perencanaan masyarakat, pemerintah juga berhak untuk mengetahui dan mengawasi proses pembangunan desa. Dana Desa harus dialokasikan dan digunakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, asas pengelolaan keuangan desa, pasal 2 ayat 1 dan 2, pengelolaan keuangan desa harus dikelola selama satu tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Selain itu, harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (PM Nomor 113, 2014)

Berdasarkan Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut (Nurhayati, 2019) Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengubah masyarakat yang belum memiliki kekuatan dan kemampuan menjadi lebih berdaya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari pentingnya memperoleh pengetahuan dan kemampuan. Menurut (Susanti et al., 2023) Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi masyarakat yang lemah, miskin, dan terpinggirkan secara utuh dan nyata, sehingga mereka dapat mandiri secara sosial ekonomi, mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

Pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam mengukur keefektifan program-program yang dijalankan di desa. Kualitas suatu daerah dapat dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa yang baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor kunci untuk mendukung kepala desa dan perangkat desa dalam mencapai program-program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun kendala dalam merealisasikan program dana desa tidak hanya berasal dari pemerintah dan masyarakat desa sendiri, tetapi juga dapat datang dari pihak luar dan kondisi sosial masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan solusi yang tepat agar pengelolaan dana desa dapat dimaksimalkan.

Menurut Mardianto dan Soebiato (2015) upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam tiga sisi yaitu :

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang (enabling), Pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat ini diharapkan bisalebih mengembangkan potensi atau kemampuan yang telah ada di masyarakat sehingga masyarakat sudah bisa menerima dan juga lebih mudah berpartisipasi.
2. Memperkuat potensi atau kemampuan yang dimiliki masyarakat (empowering), Pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat perlu mempertimbangkan dan menguatkan potensi yang telah dimiliki masyarakat, biasanya masyarakat tidak menyadari potensi yang dimilikinya sehingga dengan pemberdayaan maka akan membuatnya menyadari potensi yang dimiliki dan juga akan mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut dengan menjadi lebih baik lagi.
3. Melindungi, pemberdayaan masyarakat perlu melindungi potensi bukan sekedar potensi yang besar yang diberdayakan saja lalu potensi yang kecil tidak, dalam pemberdayaan masyarakat ini perlu untuk melindungi potensi yang lemah sehingga semua bisa berkembang bersama baik potensi yang kuat maupun yang lemah.
4. Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat ini tentu saja lebih ditekankan pada potensi atau kemampuan mereka sehingga ketika diberdayakan akan bisa lebih produktif lagi. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, memiliki daya saing, dan mandiri.

Kecamatan Jampang Kulon adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan luas wilayah 7285,79 hektar, dan memiliki 10 desa dan 1 Kelurahan, yakni: Desa Tanjung, Desa Padajaya, Desa Mekarjaya, Desa Nagraksari, Desa Cikarang, Desa Ciparay, Desa Bojongsari, Desa Cikaranggeusan, Desa Karanganyar, Desa Bojonggenteng, serta Kelurahan Jampang Kulon. Pada tahun 2020, dari jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa di Kabupaten Sukabumi ini, terdapat 175 ribu penduduk miskin dengan persentase 7,09 persen. Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Jampangkulon berada di sebelah utara Kecamatan Waluran dan Lengkon, sebelah selatan Kecamatan Cibitung dan Surade, sebelah barat Kecamatan Surade dan Waluran serta sebelah timur Kecamatan Cimanggu. (Kecamatan Jampangkulon, 2023).

Menurut Abdul Halim Iskandar, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada tahun 2021, Dana Desa yang diterima oleh desa-desa mencapai Rp. 2 miliar. Dana ini berasal dari APBN sebesar Rp. 1,3 miliar dan dari APBD sebesar Rp. 800

juta. Namun, pertanyaan muncul apakah desa-desa sudah mampu mengelola dan mengalokasikan dana tersebut dengan baik sesuai peraturan dan kepuasan masyarakat. Sebelumnya, desa-desa hanya mendapat bantuan keuangan terbatas yang dikelola secara sentralistik oleh instansi pemerintahan. Namun, dengan kewenangan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa secara mandiri, dibutuhkan kebijakan yang transparan dan akuntabel dari perangkat desa. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berikut jumlah dana desa tahun 2023 per Kecamatan Jampangkulon

Tabel 1. Jumlah Dana Desa per Desa Se Kecamatan Jampangkulon Tahun 2023

Desa	Dana Desa (Rp)
Bojonggenteng	Rp. 835.600.000
Bojongsari	Rp. 948.719.000
Cikarang	Rp. 877.304.000
Cikaranggeusan	Rp. 909.320.000
Ciparay	Rp. 903.306.000
Karanganyar	Rp. 681.902.000
Mekarjaya	Rp. 923.520.000
Nagraksari	Rp. 773.682.000
Padajaya	Rp. 759.275.000
Tanjung	Rp. 1.006.540.500

Sumber : Kecamatan Jampangkulon, diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 1.1, Menunjukkan bahwa masalah yang dipaparkan menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jampangkulon salah satunya yaitu Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjung, Desa Bojongsari, Desa Bojonggenteng dan Desa Ciparay di Kecamatan Jampangkulon.

Penulis pada penelitian ini akan melakukan penelitian pada Desa Tanjung, hal ini dilihat dari :

Peneliti memilih Desa Tanjung karena desa ini mewakili spektrum luas alokasi Dana Desa. Pemilihan ini memungkinkan perbandingan efektivitas pengelolaan dana antara desa dengan alokasi dana desa yang nominalnya besar dan lebih kecil. Desa Tanjung, dengan dana terbesar, mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola dana desa yang besar secara efektif.

Penelitian ini berfokus pada desa, yaitu Tanjung dan memberikan gambaran mendalam tentang tantangan dalam pengelolaan Dana Desa. Setiap desa menghadapi masalah spesifik yang berbeda. Desa Tanjung mengalami ketidakakuratan data penduduk pemerintah desa dengan pemerintah pusat sehingga Dana Desa tidak sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk menyebabkan program dana desa Sebagian tidak dapat terealisasi,

Kurangnya partisipasi masyarakat, yang menjadi masalah di beberapa desa, berkaitan erat dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Hal ini dapat memperburuk masalah ketidakseimbangan alokasi dana dan potensi penyalahgunaan, karena kurangnya

pengawasan dari masyarakat. Keterlambatan pelaporan, yang merupakan masalah umum di semua desa, dapat mempengaruhi akurasi data dan transparansi penggunaan dana, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan alokasi dana di masa depan. Ini juga terkait dengan profesionalisme aparatur desa dalam mengelola dan melaporkan penggunaan Dana Desa.

Faktor eksternal seperti pandemi dan cuaca, yang menghambat realisasi program di Ciparay, menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya bergantung pada faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi yang berada di luar kendali pemerintah desa. Masalah umum di semua desa meliputi keterlambatan pelaporan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pengawasan penggunaan dana desa. Efektivitas pengelolaan dana sangat bergantung pada akurasi data, profesionalisme aparatur, partisipasi masyarakat, dan kondisi eksternal.

Secara keseluruhan, masalah-masalah ini saling terkait dalam suatu sistem yang kompleks, di mana ketidakseimbangan alokasi dana, tantangan dalam pengelolaan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan faktor eksternal semuanya berperan dalam menentukan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Perbaikan dalam satu aspek dapat berdampak positif pada aspek lainnya, namun diperlukan pendekatan holistik untuk mengatasi berbagai tantangan ini secara efektif.

Semua masalah ini saling terkait dan mempengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dana desa. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat juga krusial untuk memastikan dana digunakan secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini penting karena tanpa solusi yang tepat, pengelolaan dana desa yang tidak efektif akan berlanjut, menyebabkan sumber daya tidak dimanfaatkan secara optimal. Ini akan mengakibatkan pembangunan yang lambat dan tidak merata, serta pemberdayaan masyarakat yang rendah, yang akan menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan berbagai hambatan dan faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa sehingga solusi yang tepat dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Dari latar belakang diatas maka peneliti akan meneliti tentang bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon (Studi Kasus di Desa Tanjung). Ketertarikan ini timbul karena program untuk meningkatkan pengelolaan dana desa dianggap penting dan memiliki dampak besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan menjadi desa yang mandiri khususnya bagi masyarakat desa di Desa Tanjung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dan menggambarkan secara mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh dari sumber asli atau pertama, seperti observasi lapangan atau wawancara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung seperti dokumen, laporan, atau data yang sudah tersedia sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teori yang dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 2014) bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas, hingga data menjadi jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan beberapa jenis uji validasi data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability, (reabilitas) dan confirmability (obyektivitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada proses penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menguraikan wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon. Wawancara yang telah dilakukan dengan 2 orang narasumber, sedangkan observasi peneliti melihat bagaimana pengelolaan dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, memantau dan melihat langsung bagaimana efektivitas dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon tersebut.

Tabel 2. Profil Narasumber

Nama Narasumber	Jabatan
Dasep Taopiqul Hikmah, S. Ag	Kepala Desa
Mulyana	Baur Keuangan (Bendahara Desa)

Badan Pengawas desa Tanjung punya tugas penting. Mereka mengawasi penggunaan Dana Desa dari awal sampai akhir. Mulai dari saat warga dan pemerintah Desa merencanakan mau pakai dana untuk apa, sampai saat proyek-proyek di Desa dikerjakan. Tujuannya supaya uang Desa dipakai dengan benar dan bermanfaat untuk semua warga. Jadi, setiap Rupiah dari Dana Desa bisa dipertanggungjawabkan, dan pembangunan Desa berjalan sesuai rencana.

1) Perencanaan

Perencanaan pembangunan Desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah proses penyusunan rencana yang melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat Desa. Prosesnya biasanya dimulai dengan musyawarah dusun atau RT/RW, dimana warga berkumpul untuk membahas kebutuhan dan aspirasi mereka. Apa yang mereka inginkan?

- Perbaikan jalan ke sawah
- Pendirian klinik kesehatan, atau program pelatihan keterampilan untuk pemuda.

Semua aspirasi ini kemudian dibawa ke musyawarah Desa yang lebih besar. Di musyawarah Desa inilah warga, bersama pemerintah Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), mendiskusikan dan memprioritaskan usulan-usulan tadi. Mereka mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan anggaran yang tersedia. Yang penting, keputusan diambil bersama, bukan hanya oleh segelintir orang. Pada proses perencanaan pengelolaan Dana Desa pemerintah Desa Tanjung telah melakukan perencanaan dalam

proses pengelolaan Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setelah RKP dilakukan pemerintah Desa akan menyusun APBDDes setiaptahunnya. Dengan demikian aspirasi masyarakat akan tertuang dalam APBDDes. Berikut dapat disajikan tabel perencanaan anggaran untuk pembangunan Desa Tanjung.

Tabel 3. Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjung Tahun 2023

Uraian	Anggaran Rp
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.818.730.953
Belanja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa Tanjung	Rp. 607.903.387
Belanja Bidang Pelaksana Pemerintah Desa Tanjung	Rp. 1.003.887.000
Belanja Bidang Pembinaan Pemerintah Desa Tanjung	Rp. 81.649.500
Belanja Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa Tanjung	Rp. 14.000.000
Total Belanja	Rp. 1.707.439.887

Sumber : Desa Tanjung, diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, perencanaan anggaran pendapatan asli Desa, pendapatan transfer (Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi Dana Desa, bantuan keuangan provinsi, dan bantuan keuangan Kabupaten/Kota) dan pendapatan lain – lain. Serta belanja Desa Tanjung tahun 2023 menunjukkan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sementara Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran untuk setiap bidang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah anggaran untuk setiap tahunnya berbeda-beda, hal ini mencerminkan pada perubahan fokus dan prioritas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon.

2) Pelaksanaan

a) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tanjung

Dalam mengelola anggaran Desa, para aparat Desa harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan keuangan Dana Desa dikelola dengan baik. Pengelolaan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa mencakup berbagai sub bidang diantaranya yaitu :

- (1) Sub bidang pendidikan
- (2) Sub bidang kesehatan
- (3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang atau pembangunan infrastruktur,
- (4) Sub bidang penataan pemukiman,
- (5) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.

Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah desa dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warganya.

(1) Bidang Pendidikan

Dana desa sebagian digunakan untuk pendidikan karena pendidikan sangat penting bagi perkembangan desa. Dengan meningkatkan pendidikan, masyarakat desa dapat mengembangkan kemampuan dan potensi mereka. Hal ini pada akhirnya akan membantu desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Pada pelaksanaan

pembangunan bidang pendidikan Desa Tanjung yaitu terdapat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, TPA, TKA, TPQ dan Madrasah NonFormal Desa Tanjung yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Tanjung dalam menepuh Pendidikan dasar. Pengelolaan dana desa untuk pembiayaan bidang pendidikan tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 7.500.000 Hal ini meliputi belanja barang dan jasa pegawai, belanja jasa terdiri dari belanja jasa Honorarium/Intensif Pelayanan Desa.

(2) Bidang Kesehatan

Pengelolaan anggaran dana desa di bidang kesehatan mencakup penyelenggaraan pos pelayanan terpadu (POSYANDU) meliputi (makan tambahan, lamsia, intensif, dan Kls Bumil) anggaran untuk pelaksanaan POSYANDU pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 191.201.500 hal ini meliputi belanja barang perlengkapan (Belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja pakaian dinas/seragam/atribut), Belanja jasa Honorarium/intensif Pelayanan Desa serta penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll.

(3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengelolaan dana desa di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa di Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon seperti infrastruktur jalan (Rehab Pengaspalan Jalan Desa), pengerasan jalan usaha tani serta Plesterisasi Jalan Lingkungan yaitu dana nya pada tahun 2023 yakni sebesar Rp. 721.589.000

(4) Bidang Kawasan Pemukiman

Pada kawasan pemukiman pembangunan berupa pembangunan sanitasi pemukiman (Belanja Modal Jembatan) selain itu juga terdapat pembangunan sumber air bersih milik Desa Tanjung, peningkatan balai kemasyarakatan serta pembangunan fasilitas jamban umum/MCK umum Anggaran untuk pengelolaan kawasan pemukiman pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 55.000.000 Dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

(5) Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Bidang perhubungan, komunikasi, dan informasi desa meliputi penyediaan informasi publik desa, seperti baliho dan poster desa mengenai anggaran dana desa Tanjung. Penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2023 untuk bidang perhubungan, komunikasi, dan informasi adalah sebesar Rp. 2.000.000 Dengan melaksanakan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat ini maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung meliputi Program yang didanai oleh dana desa seperti peningkatan kapasitas Aparatur Desa Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup pelatihan dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga desa. Penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2023 untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar Rp. 14.000.000 Secara keseluruhan, penggunaan dana desa telah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan pengembangan berbagai sektor di Desa Tanjung.

3) Pelaporan

Di bagian pelaporan Dana Desa di Desa Tanjung terdapat beberapa program desa yang sudah terealisasi dan belum terealisasi, berikut Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Tanjung Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 4. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Tanjung Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.819.972.403	Rp. 1.818.659.536	Rp. 1.314.867 (85%)
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tanjung	Rp. 607.903.387	Rp. 606.602.451	Rp. 1.000.936 (88%)
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Desa Tanjung	Rp. 1.003.887.000	Rp. 997.290.500	Rp. 6.596.500 (82%)
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tanjung	Rp. 81.649.500	Rp. 80.634.500	Rp. 1.015.000 (88%)
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung	Rp. 14.000.000	Rp. 9.250.000	Rp. 4.750.000 (82%)

Sumber : Desa Tanjung, diolah oleh peneliti

4) Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan perangkat Desa Tanjung tahun 2024 bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Bentuk pengawasan langsung berupa mendatangi langsung pada pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. BPD juga ikut serta dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Selain itu, BPD memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDesa. Jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran, BPD dapat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pihak yang berwenang. Dalam menjalankan fungsinya, BPD mengadakan musyawarah desa untuk membahas isu-isu penting yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Musyawarah ini menjadi forum bagi warga desa untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat.

Pengawasan tidak langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan tanpa harus terjun langsung ke lapangan atau berinteraksi secara langsung dengan objek yang mengelilinginya. Proses ini biasanya melibatkan analisis dokumen, laporan, dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian disusun berdasarkan hasil wawancara penulis yang diperoleh dari informan serta data hasil observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan penulis menerapkan teknik wawancara terstruktur, menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, dan menggali informasi secara mendalam dari objek penelitian.

1) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon

Efektivitas pengelolaan dana desa dapat diukur dengan tiga indikator menggunakan Teori Duncan dalam Richard M. Steers (2005:64), yaitu :

- a) **Pencapaian Tujuan:** Apakah pengelolaan dana desa telah mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b) **Integrasi:** Apakah pengelolaan dana desa telah terintegrasi dengan baik, dalam artian tidak adanya koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi antar pihak-pihak yang terlibat
- c) **Adaptasi:** Apakah pengelolaan dana desa dapat beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi, sehingga tetap dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Jika pengelolaan dana desa telah memenuhi indikator ketiga tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik terkait dana desa telah berjalan dengan efektif.

a) Pencapaian Tujuan

Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk desa digunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan ini dapat tercapai melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Tujuan dari efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penyaluran dana desa yang besar kepada seluruh desa di Indonesia. Pemerintah pusat mengharapkan agar dana tersebut digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Di sisi lain, pemerintah desa juga menetapkan tujuan-tujuan mereka sendiri dalam pengelolaan dana desa, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing. Tujuan-tujuan ini dapat meliputi peningkatan kualitas layanan publik, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, serta pengembangan sektor-sektor potensi yang khas di desa tersebut.

Pada akhirnya, baik tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dan saling melengkapi. Keduanya bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya, di mana masyarakat desa memiliki kapasitas, kesempatan, dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desanya sendiri, sehingga tercipta desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

(1) Tujuan Dana Desa dari Indikasi Perencanaan Desa

Perencanaan adalah tahap awal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Prosesnya dimulai dari tingkat dusun, di mana masyarakat berkumpul untuk mengajukan usulan-usulan mereka. Usulan-usulan ini kemudian dibawa ke forum yang lebih besar yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam forum ini, semua usulan dari masyarakat ditampung dan dipertimbangkan. Pemerintah desa kemudian memilih dan memprioritaskan usulan-usulan yang dianggap paling bermanfaat dan paling mendesak untuk kesejahteraan masyarakat. Pemilihan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Proses perencanaan yang melibatkan masyarakat ini membantu pemerintah desa untuk lebih memahami kebutuhan warganya. Selain itu, proses ini juga menjadi alat ukur bagi pemerintah desa untuk menilai seberapa efektif mereka dalam melaksanakan rencana

pembangunan yang telah disusun bersama masyarakat. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya menjadi langkah awal, tetapi juga menjadi acuan untuk evaluasi kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan.

Pada tahapan ini dijelaskan oleh Bapak Dasep Taopiqul Hikmah, S.Ag selaku Kepala Desa Tanjung bahwa terdapat perencanaan dalam pengelolaan dana desa sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang jelas. menyebutkan bahwa terdapat proses ini diawali dengan mengadakan Perencanaan pembangunan Desa dimulai dari musyawarah tingkat dusun, di mana warga mengajukan usulan. Usulan-usulan ini kemudian dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk dipertimbangkan. Pemerintah desa lalu memilih prioritas berdasarkan manfaat dan urgensi, dengan tetap mengikuti aturan pemerintah pusat.

Proses ini membantu pemerintah desa memahami kebutuhan warga dan menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan berfungsi sebagai langkah awal sekaligus acuan evaluasi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan.

Rencana kerja desa harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah yang sudah ada, menjamin kesinambungan pembangunan dari waktu ke waktu. Dokumen rencana kerja ini perlu memuat indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pemerintah desa untuk menilai efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan. Dengan adanya indikator, pemerintah desa dapat mengukur apakah program-program yang dijalankan benar-benar bermanfaat dan membawa perubahan positif bagi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan program Desa di Tanjung melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Warga diwajibkan hadir dalam musyawarah desa dan memberikan usulan. Aparatur desa kemudian membahas usulan tersebut untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa dan menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Bentuk keterlibatannya dengan mengikuti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat

(2) Pencapaian Tujuan Pemberian Dana Desa

Pemberian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui partisipasi aktif masyarakat. Ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan pengembangan potensi desa, seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Program-program ini mencakup pengembangan BUMDes dan kelompok tani yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi desa.

Selain itu, kegiatan padat karya tunai yang melibatkan masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan pendekatan ini, Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk membangun kapasitas masyarakat dan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan, sehingga mendorong kemandirian ekonomi desa dalam jangka panjang.

Pemberian dana desa telah membawa perubahan positif bagi masyarakat pedesaan, terutama dalam aspek pemberdayaan. Dana ini memungkinkan desa untuk melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung ini oleh Kepala Desa di Desa Tanjung menerangkan bahwa Masyarakat Desa Tanjung telah merasakan manfaat nyata dari penggunaan Dana Desa. Beberapa prioritas penggunaan dana desa ini Dampak positifnya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan desa, mulai dari perbaikan infrastruktur seperti jalan, meningkatkan sanitasi seperti pembangunan jembatan, pembangunan sumber air bersih milik Desa Tanjung serta pembangunan fasilitas jamban umum/MCK umum., digitalisasi Desa hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Dana tersebut juga digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh dana desa seperti peningkatan kapasitas Aparatur Desa Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup pelatihan dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga desa. Secara keseluruhan, penggunaan dana desa telah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan pengembangan berbagai sektor di Desa Tanjung.

- (a) Dalam program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa, salah satu prioritas utama adalah peningkatan kapasitas aparatur desa. Berikut proses pelaksanaannya:

Dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan melalui penilaian kinerja. Berdasarkan hasil ini, program pelatihan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Pelaksanaan dapat berupa pelatihan, lokakarya, atau pendampingan langsung, mencakup topik seperti administrasi, keuangan, dan kepemimpinan. Program melibatkan kerjasama berbagai pihak dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan konteks lokal. Setelah pelaksanaan, evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan memberikan masukan untuk perbaikan program selanjutnya. Proses ini berjalan berkelanjutan untuk memastikan aparatur desa terus mengembangkan kompetensi sesuai tuntutan pemerintahan desa yang dinamis.

Di tahun 2023 Desa Tanjung hanya menggunakan prioritas penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat yakni meningkatkan kapasitas aparatur desa ini alasannya Pertama, peningkatan kapasitas aparatur desa dianggap sebagai prioritas utama untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di desa. Kedua, keterbatasan anggaran mungkin memaksa desa untuk fokus pada program yang dianggap paling krusial. Ketiga, kurangnya pemahaman atau kapasitas dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan lainnya bisa menjadi faktor. Keempat, mungkin ada tekanan atau arahan dari pemerintah di atasnya untuk memprioritaskan peningkatan kapasitas aparatur. Kelima, desa mungkin menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi atau mengimplementasikan program pemberdayaan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir, bisa jadi ada kendala waktu atau sumber daya manusia yang membatasi kemampuan desa untuk melaksanakan program pemberdayaan yang lebih beragam.

- (b) Tantangan – tantantangan utama dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur desa adalah sebagai berikut :

Tantangan utama dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas Aparatur Desa meliputi beberapa aspek yang saling terkait. Keterbatasan anggaran sering kali

menjadi kendala utama, membatasi jangkauan dan kualitas program yang dapat dilaksanakan. Kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang bervariasi di antara aparatur desa mempersulit penyusunan program yang efektif untuk semua peserta. Resistensi terhadap perubahan dari beberapa aparatur desa dapat menghambat adopsi praktik baru. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas pelatihan di daerah terpencil juga menjadi tantangan logistik. Selain itu, kesinambungan program sering terganggu oleh pergantian aparatur desa akibat siklus politik. Kesulitan dalam mengukur dampak program secara akurat dapat mempengaruhi evaluasi dan perbaikan program. Terakhir, menyelaraskan program dengan kebutuhan spesifik dan konteks lokal setiap desa merupakan tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan yang fleksibel dan disesuaikan.

- (c) Ada Mekanisme pengawasan dari masyarakat terhadap pemerintah Desa, diantaranya sebagai berikut :

Menurut hasil Wawancara yang peneliti telah lakukan dengan Kepala Desa Tanjung mengenai bentuk Mekanisme pengawasan dari masyarakat :

Mekanisme pengawasan dari masyarakat Desa Tanjung merupakan upaya aktif warga dalam memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Bentuknya beragam dan melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam berbagai tahapan pengelolaan desa. Masyarakat Desa Tanjung biasanya terlibat dalam musyawarah desa, di mana mereka dapat menyampaikan aspirasi, mengajukan pertanyaan, dan meminta pertanggungjawaban kepada aparatur desa. Pengawasan juga dilakukan melalui mekanisme pengaduan, baik secara langsung ke kantor desa maupun melalui media sosial atau saluran komunikasi lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung berperan penting sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. BPD sering mengadakan pertemuan dengan warga untuk menampung aspirasi dan menyampaikannya kepada pemerintah desa. Efektivitas pengawasan ini bergantung pada keterbukaan pemerintah Desa Tanjung, kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya, serta adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas atas temuan atau masukan dari masyarakat.

2) Indikator Keberhasilan untuk mengukur Efektivitas program berdasarkan Realisasi Anggaran

Menurut Abbdul Halim (2002) Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill. Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa pada Desa Tanjung pada tahun 2023 menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan Desa Dedekadu/Kemdagri. Kepmendagri No 69-.900.327).

$$Efektivitas = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

Bagaimana kita bisa menilai bahwa sebuah organisasi berjalan dengan baik? Salah satu caranya adalah dengan melihat rasio efektivitasnya. Jika organisasi tersebut mencapai

rasio antara 80% hingga 89%, kita bisa mengatakan kinerjanya sudah baik. Namun tentu saja akan lebih mengagumkan jika organisasi mampu melampaui angka tersebut.

Dana Desa yang didapatkan Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.017.887.000 Dana Desa tersebut terbagi beberapa hal, yaitu :

- a) Dana Biaya Pengelolaan Pembangunan sebesar Rp. 997.290.500.00
- b) Dana biaya pembinaan kemasyarakatan Desa Tanjung sebesar Rp. 81.649.500
- c) Biaya pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung sebesar Rp. 14.000.000
- d) Realisasi belanja Desa pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.006.540.500

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Tanjung tahun 2023 sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{1.006.540.500}{1.017.887.000} \times 100\% = 82\%$$

Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tanjung untuk tahun anggaran 2023 menunjukkan hasil yang cukup efektif. Penilaian ini didasarkan pada rasio efektivitas yang mencapai 82%, yang masuk dalam rentang 80-89%. Kategori "cukup efektif" ini menggambarkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar target penggunaan dana desa telah terealisasi, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa Tanjung bahwa Pengelolaan Dana Desa di Tanjung telah menunjukkan hasil yang positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah adanya Dana Desa, sebagaimana tercermin dari evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran 2023. Dengan rasio efektivitas mencapai 82%, yang termasuk dalam kategori "cukup efektif", dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa telah memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pencapaian ini mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Tanjung telah berhasil mengimplementasikan sebagian besar program yang direncanakan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga. Meskipun belum mencapai tingkat efektivitas optimal, hasil ini menunjukkan adanya perbaikan infrastruktur, layanan publik, dan program pemberdayaan yang telah terealisasi.

Pengelolaan Dana Desa di Tanjung telah menunjukkan hasil yang positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut digunakan secara seimbang untuk dua tujuan utama: pembangunan fasilitas umum dan program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan kedua aspek ini dinilai sebagai indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data realisasi belanja dibandingkan dengan target belanja, efektivitas penggunaan Dana Desa di Tanjung mencapai 82%. Angka ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana tersebut cukup efektif. Tingkat efektivitas ini dianggap mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum di desa tersebut. Keberhasilan ini kemungkinan

besar telah menghasilkan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti akses yang lebih baik ke fasilitas umum, peningkatan produktivitas ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat. Meski masih ada ruang untuk peningkatan, tingkat efektivitas yang dicapai menunjukkan bahwa Dana Desa telah dikelola dengan cukup baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Tanjung. .

Berikut analisis mengenai sejauh mana Dana Desa di Desa Tanjung telah efektif dalam memberdayakan masyarakat :

Dana Desa di Desa Tanjung telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam memberdayakan masyarakat, terutama melalui program peningkatan kapasitas aparatur desa dan kegiatan pelatihan untuk warga. Peningkatan kapasitas aparatur desa telah memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik di desa, yang secara tidak langsung berdampak positif pada kehidupan masyarakat. Para aparatur desa kini lebih mampu merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan dengan lebih efektif. Sementara itu, berbagai pelatihan dan penyuluhan untuk warga desa telah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, seperti pertanian, usaha kecil, dan keterampilan teknis lainnya.

Hal ini telah membuka peluang ekonomi baru bagi sebagian warga. Namun, dampak program-program ini belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Masih ada tantangan dalam hal partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program. Meski demikian, secara keseluruhan, Dana Desa telah berkontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dan pemerataan manfaatnya.

b) Integrasi

Komunikasi memegang peran penting dalam menentukan efektivitas program Dana Desa. Aspek-aspek kunci dalam komunikasi meliputi proses sosialisasi, kejelasan informasi tentang program, serta konsistensi antara rencana dan pelaksanaan. Keberhasilan program Dana Desa sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk secara konsisten menjalankan program sesuai rencana, serta upaya terus-menerus dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dan manfaat program, serta dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang baik dan konsistensi dalam implementasi program menjadi faktor krusial dalam mencapai kesuksesan program Dana Desa secara keseluruhan.

(1) Cara pemerintah desa Tanjung menginformasikan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat

Menurut hasil Wawancara yang peneliti telah lakukan dengan Bendahara Desa Tanjung mengenai kewajiban pemerintah Desa dalam Transparansi masalah Penggunaan Dana Desa terhadap Masyarakat yaitu Pemerintah Desa Tanjung memiliki kewajiban untuk menerapkan transparansi dalam penggunaan Dana Desa terhadap masyarakat. Hal ini mencakup keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan Dana Desa. Pemerintah desa harus menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait anggaran, program, dan realisasi

penggunaan Dana Desa. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pengumuman di papan informasi desa, pertemuan warga, atau media komunikasi lainnya.

Laporan penggunaan Dana Desa harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Pemerintah desa juga wajib menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan melaporkan penggunaan Dana Desa, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan memberikan masukan. Selain itu, pemerintah desa harus siap memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan atau keberatan yang diajukan masyarakat terkait penggunaan Dana Desa. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat, mencegah penyalahgunaan dana, dan memastikan Dana Desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Tanjung.

2) Adaptasi

(1) Sumber daya Manusia Aparatur Desa Tanjung

Menurut hasil Wawancara yang peneliti telah lakukan dengan Kepala Desa Tanjung mengenai Pelatihan khusus bagi aparatur desa dalam mengelola Dana Desa di Desa Tanjung biasanya dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka tentang aspek-aspek krusial pengelolaan keuangan desa. Program pelatihan ini umumnya mencakup materi tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan program, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Pelatihan dilakukan melalui kombinasi metode seperti seminar, workshop, dan praktek langsung. Instruktur yang berpengalaman dari pemerintah daerah atau lembaga independen biasanya diundang untuk memberikan materi.

Topik-topik seperti regulasi terbaru terkait Dana Desa, sistem akuntansi desa, dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan juga dibahas. Selain itu, pelatihan juga mencakup aspek etika dan integritas dalam pengelolaan Dana Desa untuk mencegah penyalahgunaan. Durasi pelatihan bervariasi, bisa berupa sesi singkat beberapa hari atau program yang lebih komprehensif selama beberapa minggu. Setelah pelatihan, biasanya ada evaluasi dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan aparatur desa dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam tugas sehari-hari mereka.

(2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program yang didanai Dana Desa

Menurut hasil Wawancara yang peneliti telah lakukan dengan Kepala Desa Tanjung mengenai Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program yang didanai Dana Desa di Tanjung tergolong rendah, yang tercermin dari berbagai aspek. Dalam proses musyawarah desa, kehadiran masyarakat sangat terbatas, dengan hanya sebagian kecil dari total penduduk yang berpartisipasi. Hal ini menunjukkan kurangnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa.

Selain itu, pemahaman masyarakat tentang program-program desa juga terbatas, yang mengindikasikan kurangnya sosialisasi atau ketidakefektifan penyampaian informasi dari pihak desa. Semangat masyarakat dalam mengikuti penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya juga rendah. Faktor-faktor ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi dalam implementasi program-program yang didanai Dana Desa. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi efektivitas penggunaan Dana Desa dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan upaya lebih untuk

meningkatkan kesadaran, minat, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi program-program yang didanai oleh Dana Desa.

(3) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

Menurut hasil Wawancara yang peneliti telah lakukan dengan Kepala Desa Tanjung mengenai Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tanjung, beberapa upaya dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang program-program desa melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat, seperti pengumuman di tempat-tempat umum, media sosial, atau pertemuan-pertemuan informal. Kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik minat masyarakat, seperti lomba desa atau festival budaya, yang diintegrasikan dengan sosialisasi program desa. Ketiga, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan warga. Keempat, menyederhanakan proses musyawarah desa agar lebih mudah diikuti dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kelima, memberikan insentif atau penghargaan bagi warga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa. Keenam, mengadakan pelatihan dan pemberdayaan yang lebih praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir, membangun sistem umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah menyampaikan aspirasi dan evaluasi terhadap program-program desa. Semua upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran, minat, dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa mereka.

(4) Mekanisme koordinasi antara desa dengan pihak kecamatan atau kabupaten dalam pengelolaan Dana Desa

Menurut hasil Wawancara yang peneliti telah lakukan dengan Kepala Desa Tanjung mengenai Mekanisme koordinasi antara Desa Tanjung dengan pihak kecamatan atau kabupaten dalam pengelolaan Dana Desa melibatkan beberapa tahapan dan proses yang saling terkait. Koordinasi ini dimulai sejak tahap perencanaan, di mana desa menyusun rencana penggunaan Dana Desa yang kemudian dikoordinasikan dengan kecamatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah. Pihak kecamatan dan kabupaten memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi dalam penyusunan anggaran dan program.

Selama tahap pelaksanaan, desa secara berkala melaporkan perkembangan penggunaan Dana Desa kepada kecamatan, yang selanjutnya diteruskan ke tingkat kabupaten. Kecamatan dan kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa, termasuk kunjungan lapangan untuk memverifikasi pelaksanaan program. Dalam hal pelaporan keuangan, desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kecamatan dan kabupaten sesuai dengan format dan jadwal yang telah ditentukan. Jika terdapat masalah atau kendala dalam pengelolaan Dana Desa, desa dapat meminta bantuan dan konsultasi dari kecamatan atau kabupaten. Koordinasi ini juga mencakup aspek pembinaan dan pengawasan untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai tujuan pembangunan desa.

(5) Bantuan teknis dari pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Desa

Menurut hasil Wawancara yang peneliti telah lakukan dengan Kepala Desa Tanjung mengenai Bantuan teknis dari pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Pemerintah daerah aktif membantu Desa Tanjung dalam mengelola Dana Desa melalui berbagai cara. Mereka mengadakan pelatihan untuk aparatur desa tentang cara merencanakan, menganggarkan, dan melaporkan penggunaan Dana Desa. Bantuan juga diberikan dalam bentuk pendampingan saat menyusun rencana dan anggaran desa. Pemerintah daerah menyediakan panduan tertulis dan sistem informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Aparatur desa bisa berkonsultasi dengan pejabat daerah jika menghadapi masalah. Pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan Dana Desa digunakan dengan benar dan efektif. Kadang, mereka juga membantu desa mendapatkan teknologi untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Semua bantuan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa dan menjamin penggunaan Dana Desa yang transparan dan tepat sasaran.

Kendala-Kendala Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tanjung, beberapa kendala utama dalam pengelolaan Dana Desa serta kendala aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah teridentifikasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung menghadapi beberapa kendala utama yang mempengaruhi efektivitas penggunaannya untuk pemberdayaan masyarakat. Ketidakakuratan data penduduk menjadi masalah mendasar, menyulitkan perencanaan dan alokasi sumber daya yang tepat. Partisipasi masyarakat yang rendah, terutama dalam pengawasan penggunaan Dana Desa, mengurangi transparansi dan akuntabilitas program. Keterbatasan dana menyebabkan sebagian program, termasuk pembangunan infrastruktur, tidak dapat terealisasi sepenuhnya.

Aparatur desa juga menghadapi tantangan dalam mengelola Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Mereka sering kekurangan keterampilan teknis dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang kompleks. Perubahan regulasi yang cepat mengenai penggunaan Dana Desa membuat aparatur kesulitan mengikuti aturan terbaru. Keterbatasan sumber daya manusia di desa menyulitkan pelaksanaan dan pengawasan program secara efektif. Selain itu, aparatur desa sering mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tuntutan program pemberdayaan masyarakat dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama dengan dana yang terbatas.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program desa juga menyulitkan aparatur dalam melibatkan warga dalam proses pemberdayaan. Tantangan-tantangan ini secara kolektif menghambat optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasinya.

Evaluasi dan Perbaikan Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung

Menurut hasil Wawancara yang peneliti telah lakukan dengan Kepala Desa Tanjung mengenai Evaluasi dan Perbaikan Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung diantaranya sebagai berikut :

a) Proses evaluasi penggunaan Dana Desa

Proses evaluasi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak. Evaluasi ini biasanya dimulai dengan pengumpulan data dan informasi tentang program-program yang telah dilaksanakan. Aparatur desa menyusun laporan tentang kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan, termasuk anggaran yang digunakan dan hasil yang dicapai. Masyarakat desa juga dilibatkan dalam proses ini melalui pertemuan-pertemuan desa atau survei kepuasan.

Tim evaluasi, yang biasanya terdiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari kecamatan, kemudian meninjau laporan dan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung dampak program. Mereka menilai apakah program-program tersebut sesuai dengan rencana awal, efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menggunakan dana secara tepat. Hasil evaluasi ini kemudian dibahas dalam musyawarah desa untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari masyarakat. Akhirnya, temuan dan rekomendasi dari proses evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan di masa mendatang.

b) Bagaimana Mekanisme untuk menerima masukan atau keluhan dari masyarakat

Desa Tanjung memiliki cara sederhana untuk mendengar masukan dan keluhan warganya. Biasanya, masyarakat bisa menyampaikan pendapat mereka langsung ke kantor desa atau kepada perangkat desa yang mereka temui. Ada juga kotak saran yang ditempatkan di tempat-tempat umum seperti balai desa atau pos ronda. Untuk yang lebih suka cara modern, desa menyediakan nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi. Dalam pertemuan rutin desa, warga diberi kesempatan untuk bicara dan menyampaikan keluhan. Beberapa tokoh masyarakat juga sering menjadi penghubung, menyampaikan keluhan warga ke pemerintah desa. Untuk masalah serius, biasanya diadakan pertemuan khusus antara perwakilan warga dan aparat desa. Semua masukan dan keluhan ini dicatat dan dibahas dalam rapat desa untuk mencari solusinya. Desa juga berusaha memberi tanggapan cepat atas keluhan yang masuk, baik langsung ke orangnya atau melalui pengumuman di papan informasi desa.

c) Rencana perbaikan ke depan dalam pengelolaan Dana Desa

Untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan Dana Desa, Desa Tanjung merencanakan beberapa perbaikan ke depan. Pertama, mereka akan fokus pada pemutakhiran data penduduk melalui survei menyeluruh dan penggunaan sistem informasi desa yang lebih baik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, desa akan mengadakan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya keterlibatan warga dalam pengawasan Dana Desa, termasuk melalui pertemuan rutin dan media sosial.

Desa juga berencana untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari aparatur desa dan perwakilan masyarakat untuk memantau penggunaan Dana Desa secara lebih ketat. Untuk mengatasi keterbatasan dana, desa akan berusaha mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memprioritaskan program-program yang paling dibutuhkan masyarakat dan mencari sumber pendanaan alternatif untuk program-program tambahan. Selain itu, desa akan meningkatkan pelatihan bagi aparatur desa dalam perencanaan anggaran dan manajemen proyek untuk memastikan efisiensi penggunaan Dana Desa. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di masa mendatang.

Keberlanjutan Program

a) Keberlanjutan Program Pemberdayaan masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Tanjung mengenai keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat Pembangunan desa dalam melaksanakan program desa untuk pemberdayaan masyarakat hendaknya mempunyai strategi yang tepat dan manfaat untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimaksimalkan secara efektif dan efisien, Berikut strategi Desa untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat :

Program pemberdayaan masyarakat di desa perlu dirancang dengan strategi yang tepat untuk menjamin keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan warga. Fokus utama adalah peningkatan kapasitas, baik untuk aparatur desa maupun masyarakat umum. Untuk aparatur desa, pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola desa dan melayani masyarakat. Sementara itu, warga desa diberi berbagai pelatihan dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, seperti pertanian, usaha kecil, atau keterampilan teknis lainnya.

Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga untuk membangun fondasi bagi masyarakat agar bisa mandiri dan berkelanjutan dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan meningkatkan kapasitas seluruh elemen desa, diharapkan masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan mampu memanfaatkan potensi lokal untuk kesejahteraan bersama. Keberlanjutan program ini juga ditunjang dengan evaluasi rutin dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan desa. Dengan strategi ini, desa berupaya menciptakan siklus pemberdayaan yang berkelanjutan, di mana peningkatan kapasitas akan mendorong partisipasi aktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas program dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

b) Upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Desa dalam jangka Panjang

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Desa di Desa Tanjung dalam jangka panjang, masyarakat dan aparatur desa perlu melakukan beberapa langkah.

Pertama, mereka bisa mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti memaksimalkan hasil pertanian, kerajinan, atau pariwisata desa, yang bisa menjadi sumber pendapatan alternatif. Selain itu, peningkatan keterampilan dan pendidikan warga sangat penting agar mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha sendiri dan berkontribusi pada perekonomian desa.

Aparatur desa juga perlu mencari kemitraan dengan pihak swasta, seperti perusahaan atau lembaga non-pemerintah, yang bisa memberikan investasi atau bantuan teknis. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam berbagai sektor juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga desa bisa lebih mandiri. Mencari sumber pendanaan alternatif, seperti hibah atau program bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, juga bisa membantu mengurangi ketergantungan pada Dana Desa. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting agar masyarakat percaya dan mau terlibat aktif dalam setiap program yang dijalankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengumpulan data, pengolahan data serta analisis data yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan yaitu pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung dalam pengelolaan dana desa sudah cukup efektif, hal ini dibuktikan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu keaktifan mereka dalam membangun desa, dari perencanaan pelaksanaan hingga pengawasan. Sehingga Pemberdayaan mereka membuat program lebih relevan dengan kebutuhan lokal, tepat sasaran, dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat. Evaluasi pengelolaan Dana Desa menunjukkan hasil yang beragam. Desa Tanjung mencapai rasio efektivitas sekitar 80-82%, dianggap cukup efektif,

DAFTAR PUSTAKA

- Christianingrum, R. (2022). Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa Dan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 100–113. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.52>
- DEDEKADU, L. K. D. N. 69-. 900. 327). (n.d.). *LPJ Keuangan Desa Dedekadu/Kemdagri.Kepmendagri No 69-.900.327*.
- Fisabilillah, F. F. N., Nisaaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 208. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932>
- Indika, M., Marliza, Y., & Marisa, A. (2022). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Sistem Informasi ...*, 2(1).
- Kerebungu, F., & Fathimah, S. (2023). *Buku Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 1–110.
- Miles & Huberman. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (3rd ed.)*. In *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*.
- Mirna Wanti Ritonga, Muhammad Yusuf, S. (2021). analisis optimalisasi pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di kecamatan aek bilah kabupaten tapanuli selatan. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 4(1), 69–80.

<https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v4i1.3801>

- Muhamad Mu'iz Raharjo, S. STP., M. S. (2021). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*.
- Nurhayati, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, 1(2), 1–12.
- Panuluh, F. (2020). Buku Pintar Dana Desa. *Proposal SIMLITAMAS*, 8–37.
- PM Nomor 113. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- PP No 43. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa 36 Pasal 93 Pengukuran Pengelolaan Dana Desa*.
- PP Nomor 60. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Susanti, R., Arsa, A., & Hafiz, A. P. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(2), 202–218.